

ABSTRAK

Konflik merupakan hal yang sangat risiko dialami di setiap negara di dunia ini. Terlebih lagi pada negara berkembang dan juga negara dengan ekonomi maupun politik yang belum stabil seperti Belarusia. Belarusia ini meskipun salah satu bagian dari Eropa namun masih memiliki ekonomi dan politik yang belum stabil karena pemerintahannya yang masih otoriter, dengan presiden yang diktator. Presiden yang seharusnya menjadi pemimpin yang mampu mengendalikan situasi di negaranya ini, justru menjadi tokoh utama dalam konflik yang terjadi di Belarusia. Presiden Alexander Lukashenko yang telah menjabat sebagai Presiden sejak tahun 1994 dimana Lukashenko pertama kali terpilih menjadi Presiden dijuluki sebagai diktator terakhir di Eropa karena selama pemerintahannya sarat akan pemaksaan kehendak, kekerasan, hingga masih memberlakukan hukuman mati bagi yang melanggar peraturan negara. Hal tersebut jelas sudah menjadi pelanggaran HAM yang berat. Uni Eropa melakukan berbagai upaya dalam rangka membantu Belarusia untuk mencapai titik terang dalam konflik tersebut dengan cara pendekatan terhadap masyarakatnya yakni mendengarkan apa yang menjadi keinginan mereka bahwa masyarakat menginginkan pemerintahan yang berdemokrasi dan kebebasan hak suara bagi warganya. Selain itu Uni Eropa juga secara ketat menjatuhkan sanksi terhadap Belarusia terutama terhadap Presiden dan kroni-kroninya. Tak hanya sanksi, bagi Uni Eropa dialog yang dilakukan Uni Eropa dengan Belarusia juga dianggap penting guna membentuk hubungan yang lebih baik antara UE dengan Belarusia sehingga Uni Eropa mampu dengan mudah menemukan cara untuk mereformasi Belarusia ke arah yang lebih baik.

Kata kunci: konflik, otoriter, diktator, Uni Eropa, sanksi, HAM